



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 3

Proses Perencanaan Advokasi 1

Fasilitator:

Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr.PH



Advokasi Kesehatan

Program S1 Kesehatan Masyarakat



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 3

Kenali Hak Anda Sebagai Warga Negara Sipil dan Masyarakat Serta Kewajiban Penyelenggara Negara



Advokasi Kesehatan

Program S1 Kesehatan Masyarakat

HAK ANDA

INFORMASI

.....

P ENDIDIKAN

...

PEKERJAAN

....



PELAYANAN

...

Sadar
UU...

Apa KEWAJIBAN NEGARA?

Pelayanan publik?

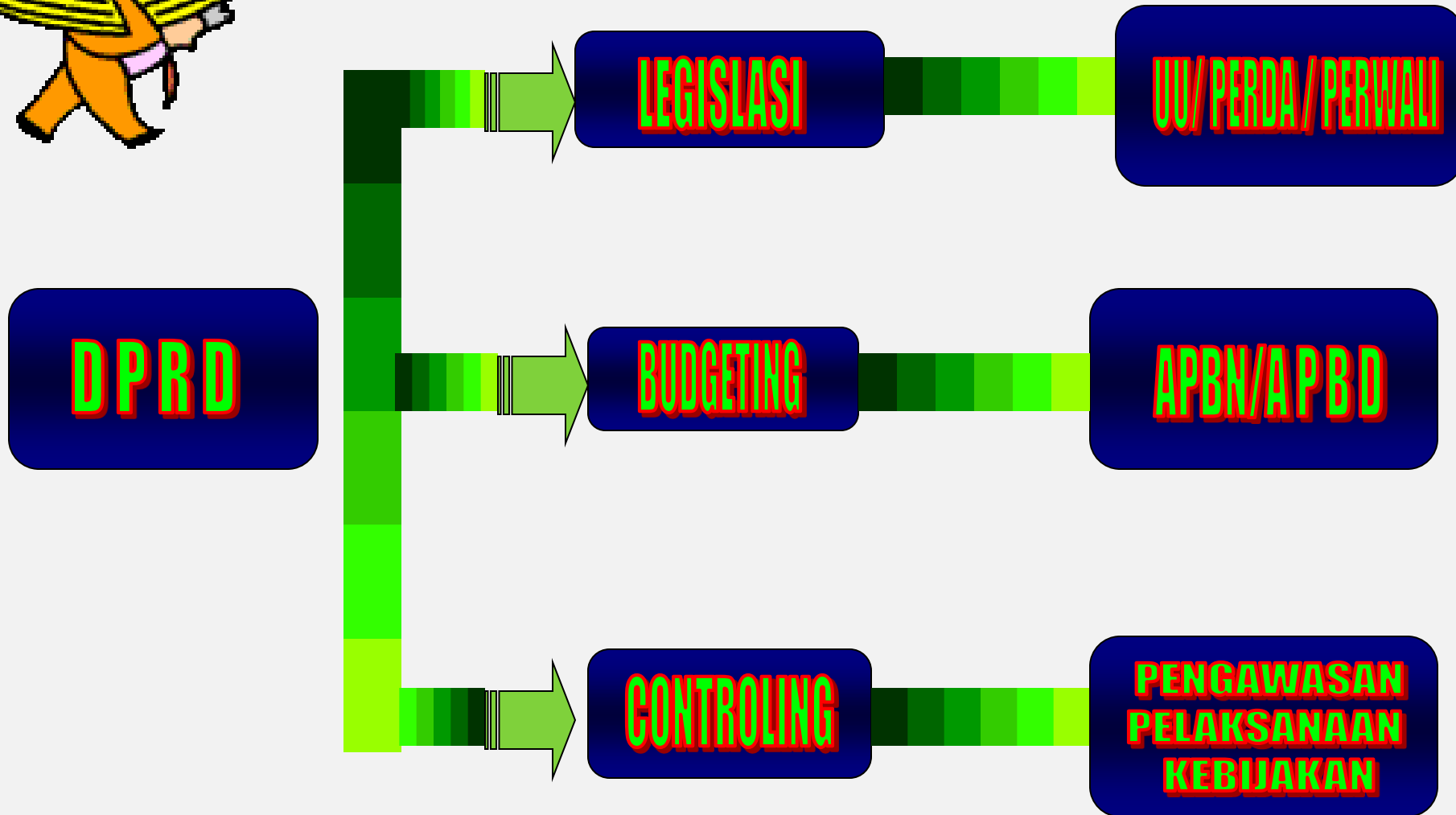
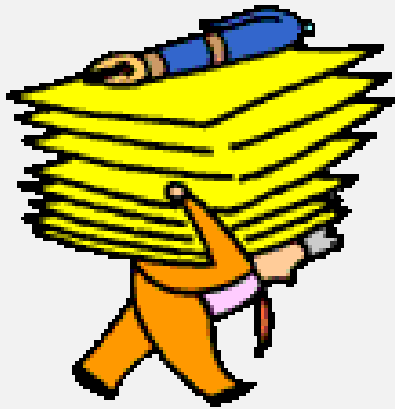
Keterbukaan
info?

Perlindungan
Konsumen?

HAM?



Fungsi DPR/ DPRD



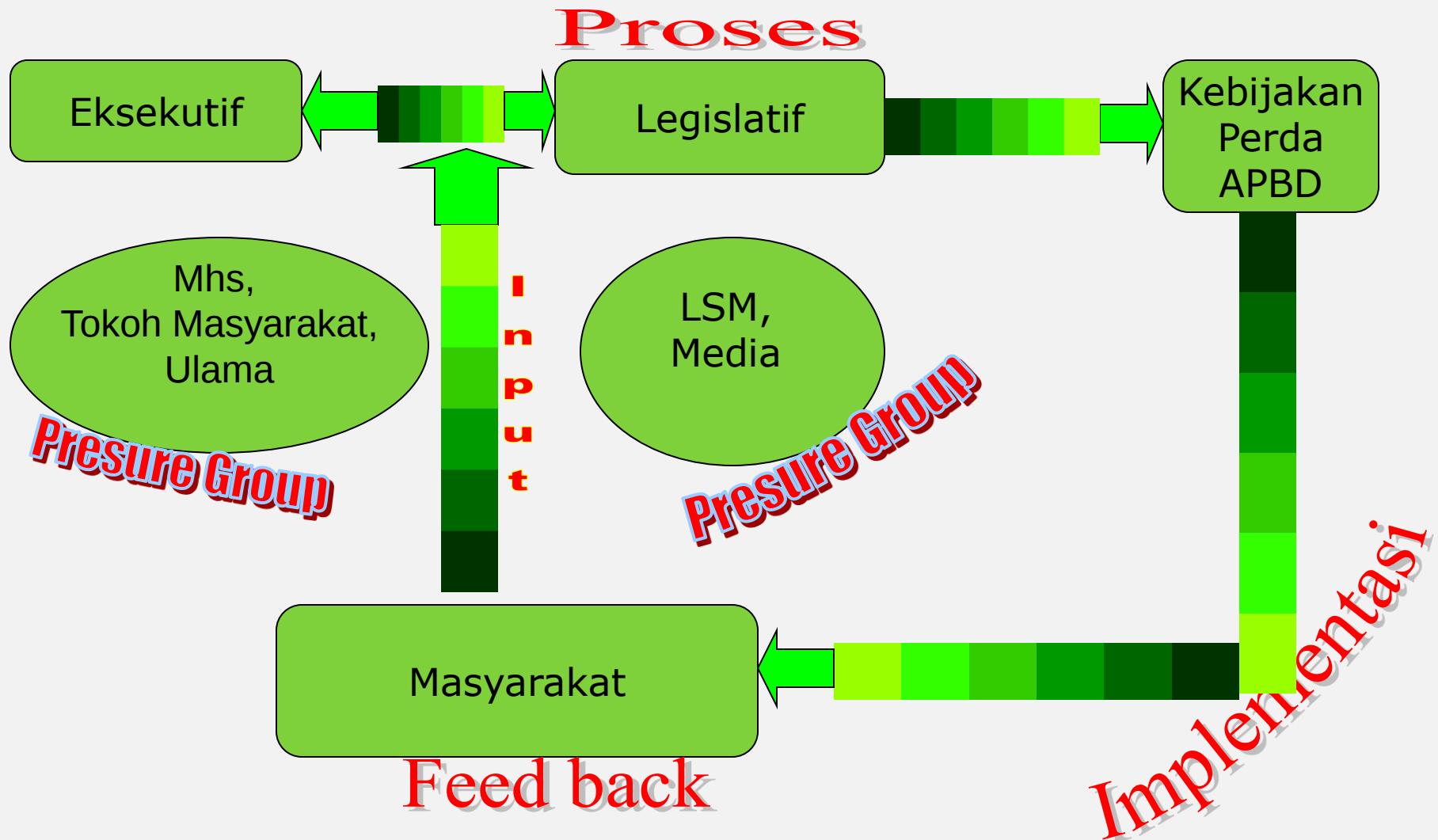
UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

1. 20 April 2008 disyahkan
2. Azas dan tujuan
3. Hak dan kewajiban pemohon, pengguna informasi dan penyelenggara badan publik
4. Informasi yg dikecualikan
5. Mekanisme memperoleh informasi
6. Komisi informasi

UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Disyahkan 18 Juli 2009
2. Tujuan dan azas? Ruang lingkup
3. Apa itu pelayanan publik? Sistem informasi? Tugas Pembina?
4. Penyelenggara Yanpublik, Ombudsman
5. Maklumat pelayanan? Perilaku pelaksana? Tarif/ beaya?
6. Hak dan kewajiban masy? Bagaimana masy menggugat?

Controlling, Advokasi & Proses Pengambilan Kebijakan



(1) LATIHAN HAK SIPIL DAN WARGA NEGARA (Keterbukaan Informasi)

1. Sebagai warga sipil, berilah contoh contoh (2-3) mencari informasi pd badan layanan publik di tempat anda? Apakah tersedia? Dari pengalaman bagaimana cara anda memperoleh informasi tsb? Adakah hambatan?
2. Dikaitkan dng implementasi UU RI 14 2008 ttg Keterbukaan informasi Publik, mnrt kelompok apa yg seharusnya terjadi? Bagaimana kelompok menyikapi hal tsb sehingga mendapat hak informasi

(2) LATIHAN HAK SIPIIL DAN WARGA NEGARA (Pelayanan Publik)

1. Sebagai warga masy, berilah contoh contoh (2-3) ketidakpuasan dalam pelayanan publik di tempat anda? Uraikan kenapa ketidakpuasan terjadi?
2. Dikaitkan dng implementasi UU RI 25 2009 ttg Pelayanan Publik, mnrt kelompok apa yg seharusnya terjadi? Bagaimana kelompok menyikapi hal tsb sehingga mendapat hak pelayanan publik yg memuaskan?
3. Berdasarkan ke 2 UU tsb, berkaitan dng tugas dan fungsi DPRD informasi apa yg klp ingin dptkan? Bagaimana klp dpt akses info tsb?

(3) LATIHAN HAK SIPIL DAN WARGA NEGARA (Main Kartu)

1. GAME CARD (MAIN KARTU)
2. Setiap kelpk membuat 10 kartu pertanyaan dan 10 kartu jawaban terkait dua (2) UU tsb Sedapat mungkin gunakan warna yg berbeda utk masing-masing.
3. Bagikan semua kartu secara merata kepada setiap anggota klp. Ka klp mengatur permainan (mengocok kartu) dan membagikan pertanyaan dan anggota lain menjawab sesuai kartu yg dimiliki
4. Permainan dilakukan satu putaran lengkap (20 menit)

(4) LATIHAN HAK SIPIL DAN WARGA NEGARA (Presentasi & Diskusi)

1. Persiapan presentasi
2. Tiap kelp menyiapkan maks 4-5 slaid utk setiap tugas terkait UU boleh tambah 1-2 gambar/ foto (gunakan huruf yg ukuran cukup besar, dapat dibaca jelas, kontras warna yg baik, latar belakang yg simple)
3. Penyaji berbicara secara ringkas, jelas, lugas dalam waktu maks 5-8 menit seperti layaknya presentasi di depan publik
4. Setiap kesempatan presenter/ penyaji berbeda
5. MAIN KARTU DAN PRESENTASI MGG DPN



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Contoh DPRD Kota Bogor

Mengenal Khalayak Sasaran :
Fungsi dan Peran DPRD Dalam Mendukung Program
Kesehatan Masyarakat Kota Bogor

(Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor periode..?)



Advokasi Kesehatan

Program S1 Kesehatan Masyarakat

BIO DATA

Nama : Iwan Suryawan, S.Sos
TTL : Bogor, 14 Mei 1970
Alamat : Komplek Sindang Barang Asri Blok D No. 9 RT 06/03
Sindang Barang Bogor (085925040225)
Pendidikan : S-1 di Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas
Tanjungpura Pontianak-Kalbar
Status : Sudah Menikah
Tugas : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Organisasi :
1. Wakil Ketua KPAD Kota Bogor
2. Ketua Pengcab PSSI Kota Bogor
3. Ketua BKC Kota Bogor
4. Pembina Yayasan Al Bunyan
5. Pembina Yayasan Progress Insani
6. Wakil Ketua Yayasan Annizariyah
7. Sekretaris Daerah Dakwah 4 DPW PKS Jabar



Gambaran Umum Kota Bogor



- Luas : 11.000 Ha
- Penduduk : 850 rb
- Kecamatan : 6
- Desa/Kel : 68
- Penduduk Miskin : 41.513 KK
- Pengangguran tercatat : 42 rb
- IPM : 77 , APBD : Rp. 631 M

Masalah Kota Bogor

Angkot...
Macet....
euy.....

P K L

Jalan
barolong euy
....

Kemiski
nan...
Anjal...
Gepeng
...



HIV - AIDS

Sampah
numpuk...barala

4 Prioritas Pembangunan

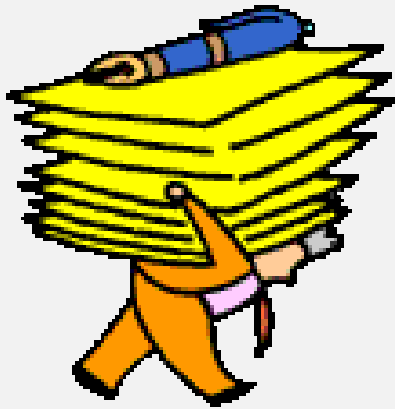
TRANSPORTASI

KEBERSIHAN

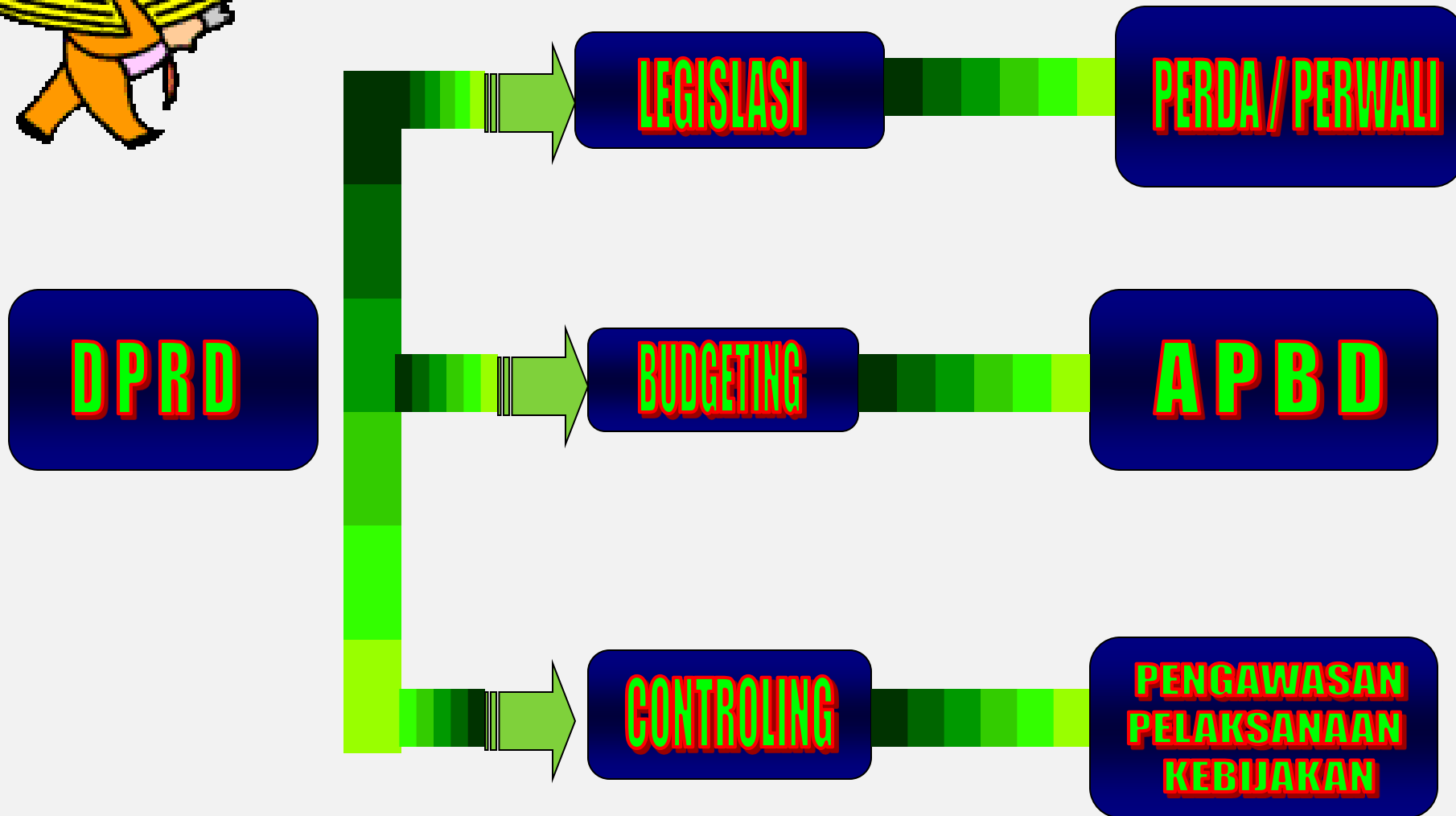
KEMISKINAN

PKL





Fungsi DPRD



Legislasi

1. Perda Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
2. Perda Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Ketertiban Umum
3. Perda Nomor 4 Tahun 2006
Tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan
4. Kebijakan Umum Anggaran
5. Rencana Strategis Kota Bogor 2004-2009

Perda No. 3 / 2005

1. Mengatur Tentang Sistem Kesehatan (Bab II)
diantaranya :
 - a. Upaya Kesehatan
 - b. Pembiayaan Kesehatan
 - c. SDM Kesehatan
 - d. Sarana dan Perbekalan Kesehatan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Manajemen kesehatan

Perda No. 3 / 2005

2. Dalam Hal Pembiayaan Mengatur Tentang :
 - a. Pemda Memprioritaskan Anggaran Pembiayaan Kesehatan Sekurangnya 15% dari APBD. (Ps. 13 Ayat 2) Dilaksanakan Secara bertahap (Penjelasan).
 - b. Pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin merupakan tanggung jawab Pemda melalui APBD (Ps 14 ayat 2).

Perda No. 3 / 2005

3. Manajemen Puskesmas Mengatur :

Dana yang berasal dari retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan SDM serta jasa pelayanan dan pembinaan manajemen pelayanan kesehatan Puskesmas. (Ps 30 ayat 1)

Perda No. 3 / 2005

4. Pembinaan dan Pengawasan, dengan arah :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau.
 - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan.
 - d. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan
 - e. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. (Ps 44 – 47)

Perda No. 3 / 2005

5. Sanksi Administrasi : (Ps 49)

- a. Pembatalan dan Pencabutan Izin
- b. Denda Administratif
- c. Sanksi Polisional

6. Ketentuan Pidana

Ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,-

Perda No. 3 / 2005

6. Peran serta masyarakat : (Ps 48)
 - a. Masyarakat dapat berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah pada penyelenggaraan kesehatan.
 - b. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan serta mengawasi penyelenggaraan kesehatan.
 - c. Dapat dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah.

Perda No. 8/2006

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum yang meliputi : (Ps 2-3)
 - a. Tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya.
 - b. Tertib Usaha Tertentu
 - c. Tertib Lingkungan
 - d. Tertib sungai, saluran air dan sumber air
 - e. Tertib Penghuni bangunan
 - f. Tertib kawasan tanpa rokok
 - g. Tertib minuman beralkohol
 - h. Tertib susila
 - i. Tertib sosial

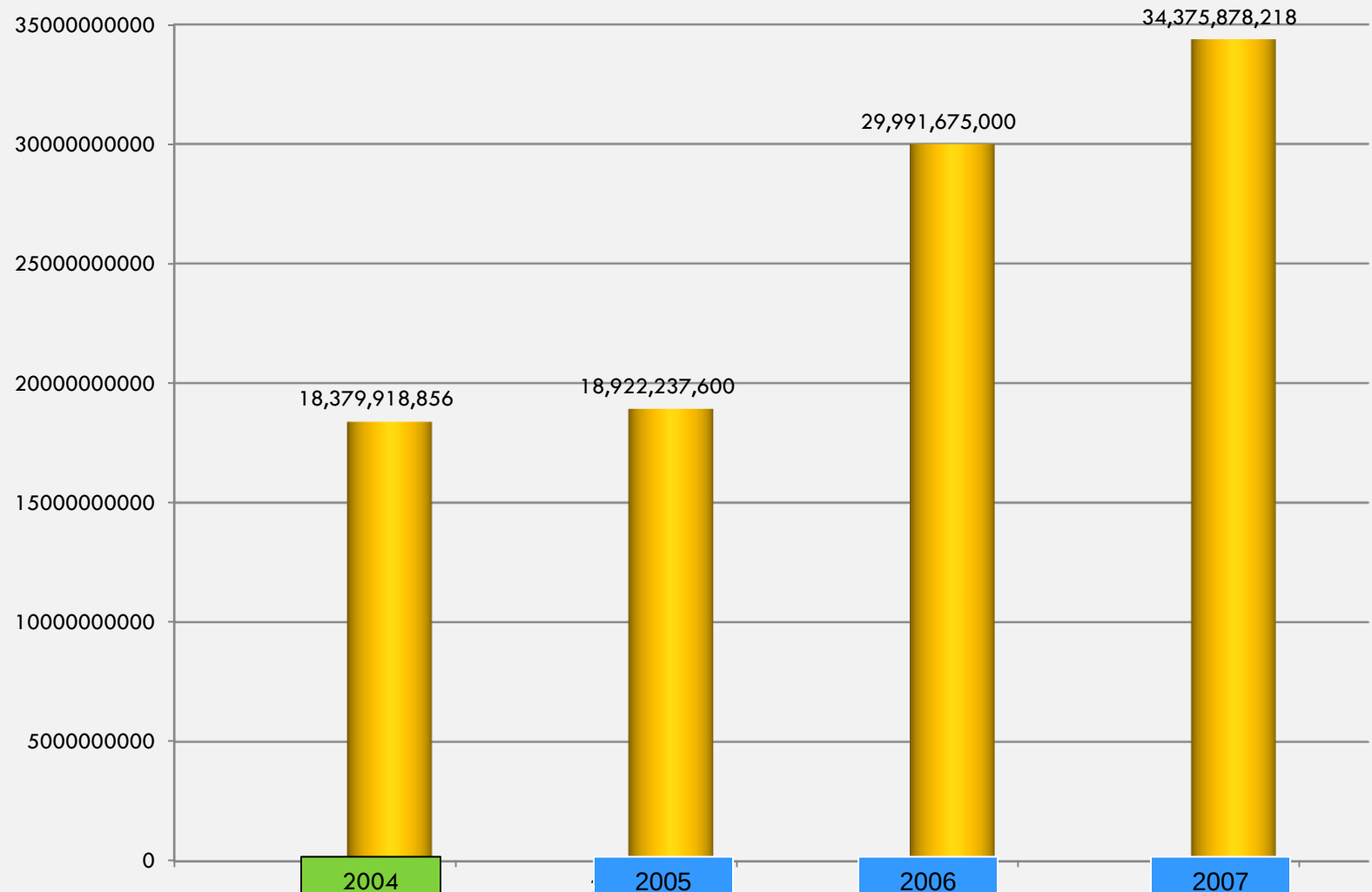
Bidang Anggaran

B
e
l
a
n
j
a

Anggaran	2004	2005	2006
Belanja Umum	11.882.728.071	12.278.209.000	14.309.309.000
Belanja Operasional Dan Pemeliharaan	4.605.190.785	5.793.086.850	10.078.366.000
Belanja Modal	1.892.000.000	1.043.000.000	5.604.000.000
Total	18.379.918.856	18.922.237.600	29.991.675.000

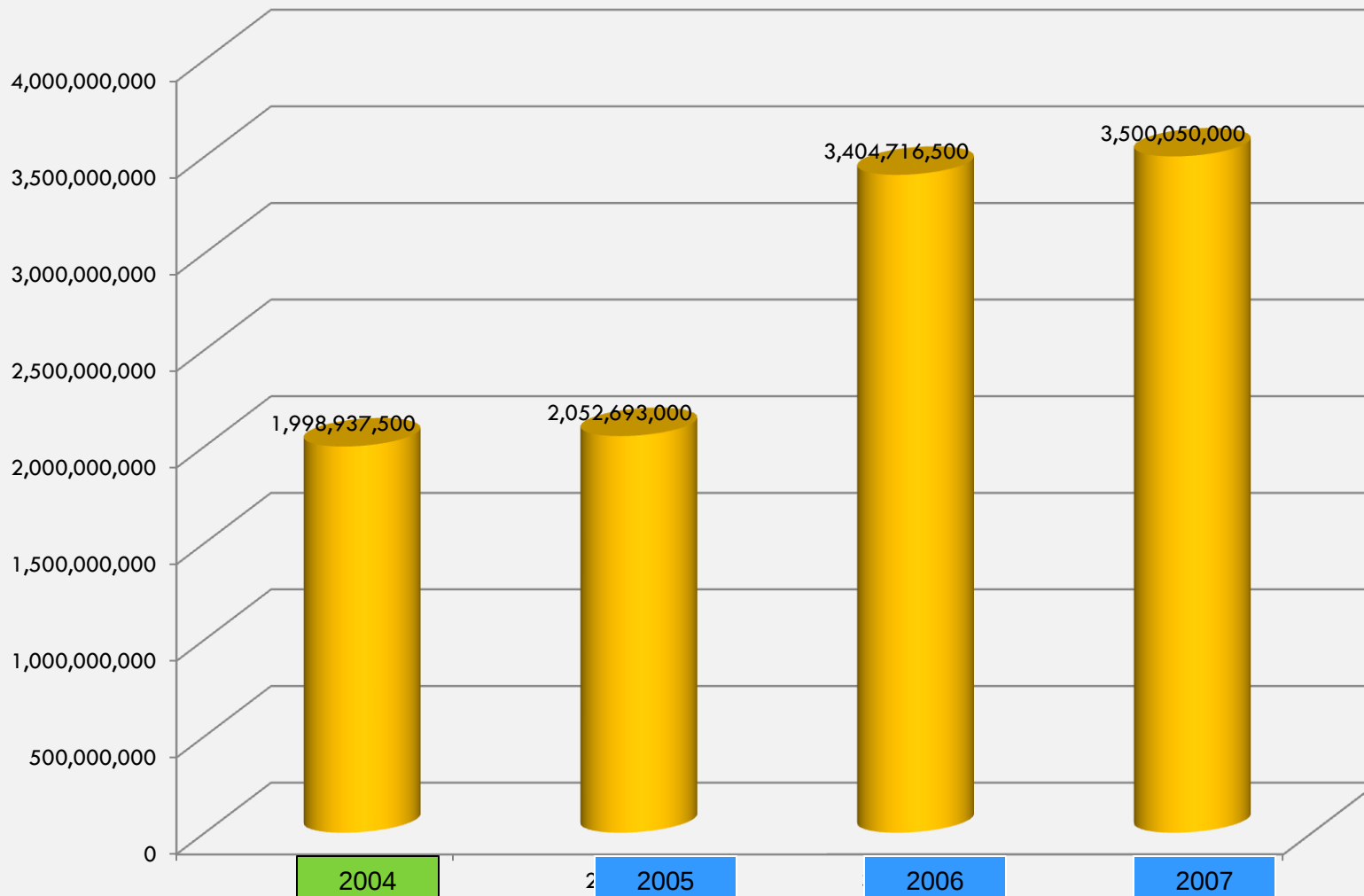
Anggaran	2007
Belanja Langsung	16.111.853.609
Belanja Tidak Langsung	18.264.024.609
Total	34.375.878.218

BELANJA KOTA BOGOR UNTUK BIDANG KESEHATAN

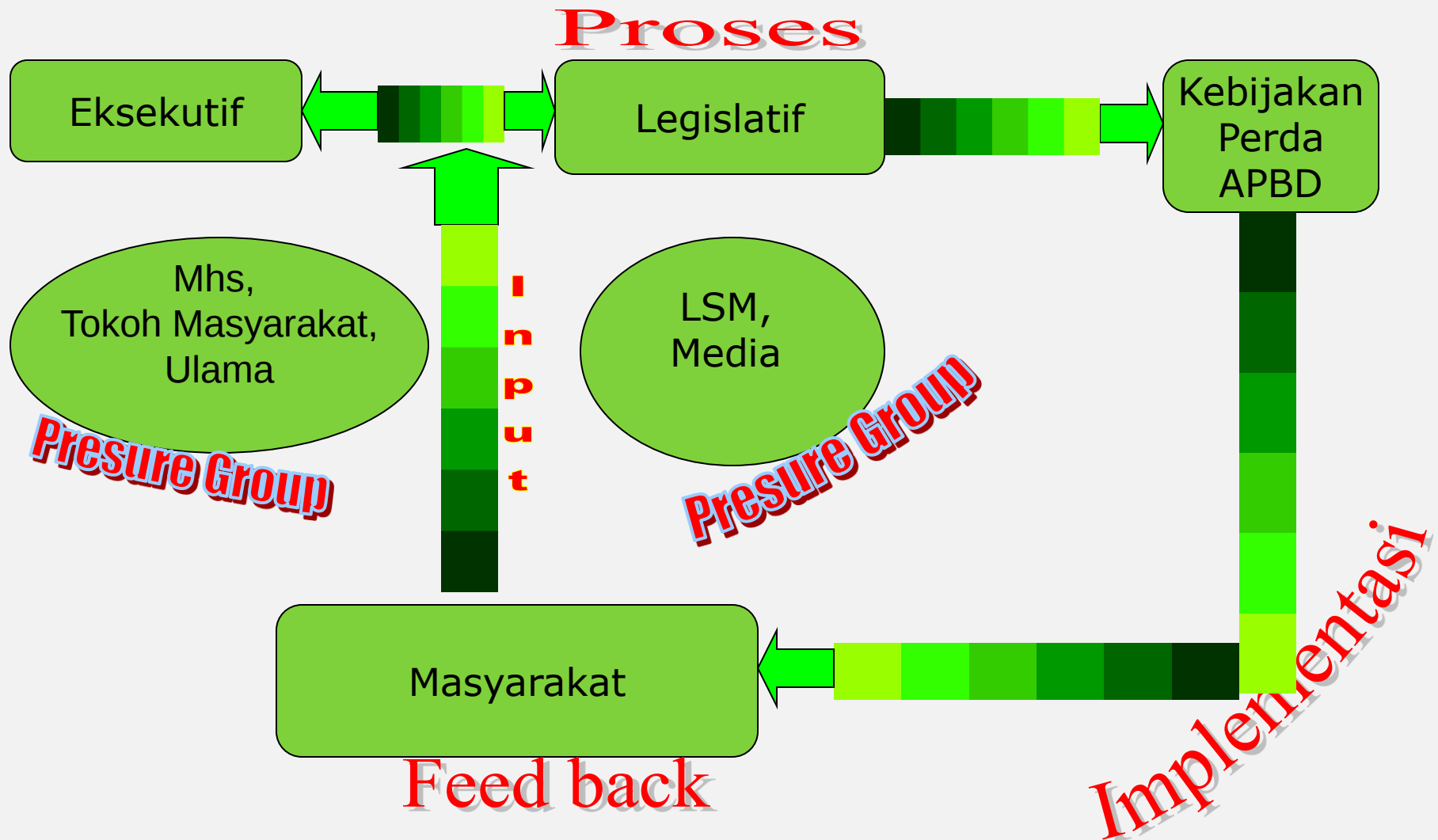


PENDAPATAN	2007
2004	1.998.937.500,-
2005	2.052.693.000,-
2006	3.404.716.500,-
2007	3.500.050.000,-

PENDAPATAN KOTA BOGOR DARI BIDANG KESEHATAN



Controlling, Advokasi & Proses Pengambilan Kebijakan



DISKUSI KELOMPOK

(Kenali Sasaran Khalayak)

Fungsi DPRD :

- Legislasi
 - Budgeting
 - Pengawasan
1. Tiap kelompok akses ke webb DPR/DPRD
 2. Pelajari fraksi , komisi dan ruang lingkup komisi serta komposisi anggota (jumlah dan partai), data pribadi dan kontak akses
 3. Pelajari jadwal kerja dan agenda kerja termasuk isu terkini yang sedang digarap
 - Presentasi minggu depan (maks 10 slaid)

Daftar anggota kelompok serahkan lewat Ka Klas. Terima kasih



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Advokasi Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Sesi 3

Proses Perencanaan Advokasi

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH



Advokasi Kesehatan
Program S1 Kesehatan Masyarakat